



Artikel Tinjauan Pustaka

Naskah dikirim: 25/09/2025—Selesai revisi: 21/10/2025—Disetujui: 23/11/2025—Diterbitkan: 01/12/2025

Perundungan di Sekolah sebagai Indikator Kegagalan Internalisasi Etika Sosial: Implikasinya terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

Suwandi¹, Heri Kurnia²

^{1,2}Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

E-mail: wandy.idoy@gmail.com¹; dosen03087@unpam.ac.id²

Abstrak: Perundungan di sekolah merupakan persoalan pendidikan yang berdampak serius terhadap pembentukan karakter, kesehatan mental, dan kualitas sumber daya manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya berhasil menjalankan fungsinya sebagai ruang internalisasi etika sosial dan nilai kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika perundungan di sekolah, memahami perundungan sebagai indikator kegagalan internalisasi etika sosial, serta mengkaji implikasinya terhadap kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* (SLR) dengan pendekatan PRISMA terhadap artikel-artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dan terpublikasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa perundungan muncul dalam berbagai bentuk, baik verbal, relasional, maupun digital, yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya sekolah, dan lemahnya pendidikan karakter. Perundungan juga mencerminkan rendahnya penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai keadilan sosial dalam praktik pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa perundungan berimplikasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia melalui gangguan karakter, kompetensi sosial, dan kesehatan mental peserta didik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter dan etika sosial secara terintegrasi menjadi strategi penting dalam pencegahan perundungan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Kata kunci: perundungan; etika sosial; pendidikan karakter; sekolah; sumber daya manusia

Abstract: Bullying in schools is an educational issue that has a serious impact on character building, mental health, and the quality of human resources. This phenomenon shows that schools have not been fully successful in carrying out their function as a space for the internalization of social ethics and human values. This article aims to analyze the forms and dynamics of bullying in schools, understand bullying as an indicator of the failure of social ethics internalization, and examine its implications for the quality of human resources. This study uses the systematic literature review (SLR) method with a PRISMA approach to relevant national and international scientific articles published in the last five years. The results show that bullying occurs in various forms, including verbal, relational, and digital, which are influenced by power relations, school culture, and weak character education. Bullying also reflects a low respect for human dignity and social justice values in educational practices. These findings confirm that bullying has long-term implications for the quality of human resources through disruptions to the character, social competence, and mental health of students. Therefore, strengthening character education and social ethics in an integrated manner is an important strategy in preventing bullying and developing sustainable human resources.

Keywords: bullying; social ethics; character education; school; human resources

Hak Cipta©2025 Suwandi, Heri Kurnia



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.



1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perundungan di lingkungan sekolah Indonesia menunjukkan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan dan menjadi perhatian serius publik. Perundungan tidak lagi dipahami sebagai perilaku menyimpang individual yang bersifat sporadis, melainkan sebagai fenomena sosial yang mengakar dalam dinamika relasi antarpeserta didik dan budaya sekolah (Manggali & Rohman, 2024; Ningsih et al., 2025; Susi & Rahayu, 2025). Data nasional menunjukkan bahwa sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, justru kerap menjadi arena reproduksi kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara fungsi ideal pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dengan realitas praktik pendidikan sehari-hari. Fenomena tersebut menuntut pembacaan yang lebih mendalam dan komprehensif, tidak hanya dari sisi psikologis korban dan pelaku, tetapi juga dari perspektif struktural pendidikan dan nilai sosial yang diinternalisasikan melalui proses pembelajaran (KPAI, 2025). Data gabungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dalam Pusiknas Bareskrim Polri mengonfirmasi adanya lonjakan signifikan kasus kekerasan di satuan pendidikan. Pada tahun 2023 tercatat 285 kasus, kemudian meningkat drastis menjadi 573 kasus pada tahun 2024, dengan sekitar 31 persen di antaranya merupakan kasus perundungan (Pusiknas, 2025). Peningkatan lebih dari dua kali lipat ini menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah bukan sekadar fenomena temporer, melainkan persoalan sistemik yang belum tertangani secara efektif. Tingginya proporsi perundungan juga menandakan lemahnya mekanisme pencegahan berbasis nilai dan etika sosial di lingkungan sekolah (Permanasari, 2024). Dengan demikian, perundungan dapat dipahami sebagai cerminan kegagalan sekolah dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai institusi pembentuk perilaku dan moral peserta didik (Gutzwiller-Helfenfinger & Perren, 2022; Maharani, 2024).

Bentuk perundungan yang terjadi di sekolah pun menunjukkan karakter yang mengkhawatirkan. Data KPAI-JPPI mencatat bahwa perundungan fisik mendominasi dengan persentase lebih dari 55 persen, disusul perundungan verbal dan psikis. Fakta ini mengindikasikan bahwa kekerasan tidak hanya berlangsung dalam bentuk simbolik atau relasional, tetapi juga melibatkan agresi langsung yang berpotensi menimbulkan cedera serius. Lebih jauh, distribusi korban menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar merupakan kelompok paling rentan, diikuti oleh siswa SMP dan SMA. Kerentanan pada usia dini ini memperkuat dugaan bahwa internalisasi etika sosial dan nilai empati belum berlangsung optimal sejak fase awal pendidikan formal, sehingga perilaku agresif cenderung berkembang tanpa kontrol nilai yang memadai (Pusiknas, 2025). Dampak perundungan di sekolah tidak berhenti pada luka fisik semata, melainkan menjalar ke aspek psikologis dan sosial peserta didik. Korban perundungan kerap mengalami tekanan mental, rasa takut berlebihan, penurunan motivasi belajar, hingga keengganan untuk hadir di sekolah (Yulianti et al., 2024; Zahrani, 2024). Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi kepercayaan diri, kemampuan berinteraksi sosial, dan pembentukan karakter individu. Bahkan, dalam beberapa kasus ekstrem, perundungan dikaitkan dengan risiko depresi berat dan tindakan bunuh diri (Valera-Pozo et al., 2021). Dengan demikian, perundungan tidak hanya merusak proses pembelajaran, tetapi juga mengancam tujuan pendidikan nasional dalam membentuk manusia yang beriman, berakhlak, dan berkepribadian sosial yang sehat (Azhari et al., 2023; Pratama & Husniyah, 2025).

Kasus meninggalnya seorang siswa SMP di Tangerang Selatan pada November 2025 akibat dugaan perundungan menjadi ilustrasi konkret betapa seriusnya dampak kekerasan di sekolah. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perundungan dapat berujung pada konsekuensi fatal apabila tidak ditangani secara cepat dan komprehensif. Fakta bahwa kasus ini melibatkan interaksi sehari-hari di ruang kelas menegaskan bahwa kekerasan telah menjadi bagian dari rutinitas sosial yang luput dari pengawasan dan pengendalian nilai. Respons aparat penegak hukum dan pemeriksaan terhadap pihak sekolah memperlihatkan bahwa penanganan perundungan sering kali baru dilakukan setelah dampak terburuk terjadi, bukan melalui pencegahan berbasis pendidikan karakter dan etika sosial (Kemenpppa, 2025). Perhatian terhadap persoalan perundungan di sekolah juga datang dari level kebijakan tertinggi negara. Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa kasus perundungan, khususnya di lingkungan pendidikan, harus segera diatasi dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pernyataan ini mencerminkan pengakuan negara bahwa kekerasan di sekolah



merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda (detikcom, 2025). Namun demikian, perhatian politik tersebut perlu diiringi dengan evaluasi mendalam terhadap pendekatan pendidikan yang selama ini dijalankan. Tanpa pemberian pada aspek internalisasi nilai, etika sosial, dan budaya sekolah, respons kebijakan berisiko hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan (Michelini, 2022; Wastri et al., 2023).

Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri semakin memperkuat gambaran meningkatnya kekerasan terhadap anak di Indonesia. Sepanjang Januari hingga pertengahan November 2025 tercatat lebih dari 14.500 korban tindak pidana perlindungan anak, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan, merupakan masalah kronis yang belum tertangani secara sistemik. Dominasi korban perempuan dan konsentrasi kasus di beberapa provinsi besar juga mengindikasikan adanya faktor lingkungan sosial dan institusional yang berkontribusi terhadap tingginya risiko kekerasan (Pusiknas, 2025). Fenomena perundungan di sekolah menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat dan telah mencapai kategori tinggi, tantangan kualitas sumber daya manusia masih cukup besar (BPS, 2025). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,85 persen, dengan proporsi signifikan berasal dari kelompok usia muda dan lulusan pendidikan menengah. Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan akses dan capaian pendidikan formal belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesiapan individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam dunia kerja (BPS, 2025).

Selain tingkat pengangguran, struktur ketenagakerjaan Indonesia juga menunjukkan dominasi pekerja berpendidikan rendah dan sektor informal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, khususnya terkait kompetensi non-kognitif seperti etika kerja, kemampuan berkomunikasi, kerja sama, dan pengendalian emosi. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan akademik, tetapi juga oleh karakter dan etika sosial yang terbentuk sejak masa sekolah. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan yang tidak aman dan permisif terhadap perundungan berpotensi menghasilkan lulusan yang rapuh secara sosial dan kurang adaptif terhadap tuntutan dunia kerja. Dalam konteks tersebut, perundungan di sekolah dapat dipahami sebagai indikator awal kegagalan internalisasi etika sosial dalam sistem pendidikan. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai arena pembelajaran nilai, norma, dan relasi sosial yang sehat (Mazumdar, 2022). Ketika kekerasan dibiarkan atau dinormalisasi, peserta didik belajar bahwa dominasi, agresi, dan ketidakpedulian terhadap sesama adalah perilaku yang dapat diterima. Proses pembelajaran semacam ini berpotensi membentuk karakter individu yang bermasalah secara sosial dan etis, yang dampaknya dapat terbawa hingga ke dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat (Meza et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya memfokuskan kajian perundungan pada aspek psikologis korban dan pelaku, seperti stres, trauma, dan prestasi belajar (McGuire, 2022; Yılmaz, 2021). Meskipun penting, pendekatan tersebut cenderung melihat perundungan sebagai masalah individual atau relasional semata. Relatif sedikit kajian yang menempatkan perundungan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai kegagalan sistem pendidikan dalam menginternalisasikan etika sosial dan membangun budaya sekolah yang aman. Akibatnya, diskursus ilmiah sering kali terfragmentasi dan kurang mengaitkan fenomena perundungan dengan implikasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Keterbatasan perspektif tersebut membuka ruang bagi pendekatan yang lebih integratif dan interdisipliner. Mengaitkan fenomena perundungan di sekolah dengan isu kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan memungkinkan pemahaman yang lebih utuh mengenai dampak pendidikan yang gagal membangun karakter sosial. Pendekatan ini menempatkan perundungan bukan sekadar sebagai masalah disiplin sekolah, tetapi sebagai gejala dari sistem pendidikan yang terlalu menekankan aspek kognitif dan mengabaikan pembentukan etika sosial.

Dengan demikian, analisis perundungan dapat berkontribusi pada diskursus yang lebih luas mengenai kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Dari perspektif kebijakan pendidikan,



kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program penguatan karakter dan pencegahan kekerasan di sekolah. Meskipun berbagai regulasi dan program telah dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, data empiris menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal. Ketidaksesuaian antara kebijakan normatif dan realitas lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan dalam proses internalisasi nilai di tingkat satuan pendidikan (Ismail & Hasanah, 2023; Pukada et al., 2025; Suanto & Nurdyiana, 2020). Tanpa pemberian budaya sekolah dan praktik pedagogis yang berorientasi pada etika sosial, berbagai kebijakan berpotensi kehilangan daya transformasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian yang signifikan terkait dengan pemaknaan perundungan di sekolah sebagai indikator kegagalan internalisasi etika sosial dan implikasinya terhadap kualitas sumber daya manusia. Kajian yang menghubungkan data kekerasan pendidikan dengan indikator pembangunan manusia dan ketenagakerjaan nasional masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman atas keterkaitan ini penting untuk merumuskan strategi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter sosial yang berkelanjutan. Research gap inilah yang menjadi dasar konseptual artikel ini. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perundungan di sekolah sebagai indikator kegagalan internalisasi etika sosial dalam sistem pendidikan Indonesia serta mendiskusikan implikasinya terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan data nasional dari KPAI, JPPI, Pusiknas Polri, dan Badan Pusat Statistik, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam kajian pendidikan dan pembangunan manusia. Secara praktis, temuan dan pembahasan dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih berorientasi pada penciptaan lingkungan sekolah yang aman, beretika, dan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis (*systematic literature review/SLR*) dengan mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan proses penelusuran, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga sesuai untuk mengkaji isu perundungan di sekolah sebagai fenomena multidimensional yang berkaitan dengan etika sosial dan kualitas sumber daya manusia. PRISMA banyak digunakan dalam kajian pendidikan dan ilmu sosial untuk meminimalkan bias seleksi serta meningkatkan akurasi pelaporan hasil tinjauan pustaka (Moher et al., 2009; Page et al., 2021). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan sistematis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu terkait perundungan di sekolah, internalisasi etika sosial, pendidikan karakter, dan implikasinya terhadap kualitas sumber daya manusia. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal secara langsung, melainkan untuk membangun kerangka konseptual dan argumentasi teoretis berdasarkan bukti ilmiah yang telah tersedia. Desain ini lazim digunakan dalam kajian pendidikan yang bersifat konseptual, reflektif, dan lintas disiplin (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019).

Sumber data diperoleh dari artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional melalui basis data Google Scholar, Garuda, dan SINTA, serta jurnal bereputasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selain artikel ilmiah, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dan dokumen resmi dari lembaga nasional, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, dan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk memperkuat konteks empiris nasional (Creswell & Creswell, 2017). Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci antara lain *bullying di sekolah*, *perundungan*, *etika sosial*, *pendidikan karakter*, dan *kualitas sumber daya manusia*, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Artikel yang ditelusuri dibatasi pada publikasi 5 tahun terakhir (2020–2025) untuk memastikan relevansi dengan kondisi dan kebijakan pendidikan kontemporer. Untuk menjaga konsistensi dan relevansi kajian, ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut: Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang membahas perundungan di lingkungan sekolah; (2) artikel yang mengaitkan perundungan dengan etika sosial, pendidikan karakter, atau aspek pembentukan nilai; (3) artikel yang membahas implikasi



pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia; dan (4) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional. Kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang hanya membahas perundungan di luar konteks pendidikan formal; (2) artikel populer atau non-ilmiah; serta (3) publikasi yang tidak menyediakan teks lengkap.

Proses seleksi literatur dilakukan mengikuti empat tahapan utama PRISMA, yaitu identifikasi, penyaringan (*screening*), kelayakan (*eligibility*), dan inklusi. Pada tahap identifikasi, seluruh artikel hasil penelusuran dikumpulkan dan dicatat. Tahap penyaringan dilakukan melalui penelaahan judul dan abstrak untuk mengeliminasi artikel yang tidak relevan. Selanjutnya, tahap kelayakan dilakukan dengan membaca teks lengkap untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi. Artikel yang memenuhi seluruh kriteria kemudian dimasukkan dalam tahap inklusi dan dianalisis lebih lanjut. Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi bias seleksi literatur (Moher et al., 2009; Page et al., 2021). Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yaitu teknik analisis kualitatif yang berfokus pada pengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama dalam literatur yang ditinjau. Tema-tema utama yang dianalisis meliputi bentuk dan dinamika perundungan di sekolah, proses internalisasi etika sosial dalam pendidikan, serta implikasi jangka panjang perundungan terhadap kualitas sumber daya manusia. Hasil analisis kemudian disintesis secara naratif untuk membangun argumentasi konseptual yang menempatkan perundungan sebagai indikator kegagalan internalisasi etika sosial dalam sistem pendidikan Indonesia. Analisis tematik dipilih karena efektif dalam mensintesis temuan penelitian yang bersifat konseptual dan interpretatif (Braun & Clarke, 2006; Snyder, 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik dan Kecenderungan Temuan Penelitian tentang *Bullying* dan Pendidikan Karakter

Fenomena perundungan dalam lingkungan pendidikan yang teridentifikasi dalam berbagai penelitian menunjukkan pola yang semakin kompleks dan berlapis. *Bullying* tidak lagi dapat dipahami sebagai perilaku menyimpang individual semata, melainkan sebagai gejala sosial yang berkaitan erat dengan dinamika relasi kekuasaan, struktur sosial sekolah, serta lemahnya internalisasi nilai-nilai karakter. Sejumlah studi menegaskan bahwa praktik perundungan sering tumbuh dalam iklim sekolah yang permisif terhadap kekerasan simbolik, normalisasi ejekan, serta minimnya keteladanan moral dari aktor pendidikan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perundungan merupakan persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan komprehensif, bukan sekadar penanganan insidental terhadap pelaku dan korban. Hasil sintesis literatur juga memperlihatkan bahwa sekolah memiliki peran strategis sebagai ruang sosial pembentuk karakter, namun efektivitas peran tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan kapasitas kelembagaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang telah mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum, tata kelola sekolah, dan budaya organisasi cenderung lebih mampu menekan praktik perundungan. Sebaliknya, lemahnya koordinasi internal, kurangnya pelatihan guru terkait pencegahan kekerasan, serta absennya mekanisme evaluasi berkelanjutan menyebabkan kebijakan anti-*bullying* hanya berhenti pada tataran normatif. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara regulasi formal dan praktik pendidikan sehari-hari di sekolah.

Dari perspektif metodologis, penelitian-penelitian yang dianalisis didominasi oleh pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan *systematic literature review* berbasis PRISMA. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap secara mendalam pengalaman korban, dinamika relasi sosial antar siswa, serta peran institusi pendidikan dalam merespons perundungan. Beberapa studi kuantitatif melengkapi temuan tersebut dengan data empiris mengenai dampak *bullying* terhadap kesehatan mental, prestasi akademik, dan perkembangan sosial siswa. Kombinasi pendekatan ini memperkuat kesimpulan bahwa perundungan memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan, baik bagi individu maupun bagi iklim pendidikan secara keseluruhan. Temuan literatur secara konsisten menempatkan pendidikan karakter sebagai elemen kunci dalam strategi pencegahan perundungan. Nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keadilan sosial terbukti berkontribusi dalam membangun relasi sosial yang sehat di lingkungan sekolah. Penelitian tentang implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menunjukkan bahwa internalisasi nilai karakter tidak efektif apabila

hanya disampaikan melalui pembelajaran kognitif. Pendidikan karakter justru menjadi bermakna ketika diwujudkan melalui keteladanan guru, praktik disiplin yang adil, serta budaya sekolah yang menghargai perbedaan dan dialog.

Selain itu, sejumlah penelitian menegaskan bahwa perundungan memiliki dimensi hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Bullying dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak anak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perspektif ini menempatkan pencegahan perundungan sebagai tanggung jawab etis dan hukum, bukan semata kewajiban pedagogis. Oleh karena itu, berbagai studi merekomendasikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kebijakan sekolah, partisipasi orang tua, serta dukungan regulasi yang kuat agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Tabel 1. Karakteristik Penelitian Inti dalam *Systematic Literature Review*

No	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	Pukada et al. (2025)	Implementasi PPK di SMA	Kualitatif	PPK berjalan cukup baik, terkendala SDM
2	Maharani (2024)	<i>Bullying</i> dalam perspektif sosiologi	Literatur	<i>Bullying</i> dipengaruhi struktur sosial sekolah
3	Yulianti et al. (2024)	Dampak bullying pada kesehatan mental	Kualitatif	Depresi, kecemasan, dan rasa tidak aman
4	Pratama & Husniyah (2025)	Program anti- <i>bullying</i>	SLR	Penurunan <i>bullying</i> dan penguatan karakter
5	Suanto & Nurdiyana (2020)	Implementasi kebijakan PPK	Normatif-empiris	Sesuai Perpres, perlu evaluasi berkala
6	Manggali & Rohman (2024)	Permendikbud 46/2023	Kualitatif	Lemah sosialisasi dan koordinasi
7	Permanasari (2024)	Satgas anti- <i>bullying</i>	Literatur	Implementasi belum optimal
8	Susi & Rahayu (2025)	<i>Civic education</i> & pencegahan <i>bullying</i>	Studi kasus	Edukasi kewargaan efektif
9	Zahrani (2024)	Dampak <i>bullying</i> pada siswa	PRISMA-SLR	Dampak akademik dan psikologis
10	Valera-Pozo et al. (2021)	Profil korban dan pelaku	Kuantitatif	Risiko depresi dan bunuh diri
11	Ningsih et al. (2025)	<i>Cyberbullying</i>	Kualitatif	Trauma psikologis jangka panjang
12	Azhari et al. (2023)	Pendidikan karakter & <i>bullying</i>	Literatur	Karakter menekan perilaku menyimpang
13	Ismail & Hasanah (2023)	Efektivitas pendidikan karakter	Deskriptif	Perlu integrasi manajemen sekolah
14	Killen et al. (2022)	Dimensi moral <i>bullying</i>	Teoretik	<i>Bullying</i> sebagai kegagalan moral
15	Mazumdar (2022)	Sekolah & struktur sosial	Konseptual	Sekolah membentuk relasi sosial

Bentuk dan Dinamika Perundungan di Sekolah

Hasil tinjauan pustaka menunjukkan bahwa perundungan di sekolah hadir dalam berbagai bentuk yang saling berkelindan, mulai dari kekerasan verbal, fisik, relasional, hingga perundungan berbasis digital. Kekerasan verbal seperti ejekan, penghinaan, dan pelabelan negatif merupakan bentuk yang paling sering ditemukan dan kerap dianggap sebagai perilaku wajar dalam interaksi antarsiswa. Normalisasi praktik tersebut menyebabkan perundungan sulit terdeteksi pada tahap awal, meskipun dampaknya terhadap psikologis korban sangat signifikan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa bentuk-bentuk perundungan nonfisik justru memiliki daya rusak yang lebih dalam karena berlangsung secara berulang dan terselubung (Zahrani, 2024; Yulianti et al., 2024). Dinamika perundungan di sekolah tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang terbentuk di antara siswa. Literatur menunjukkan bahwa perundungan sering kali diperaktikkan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi sosial lebih dominan, baik karena faktor usia, popularitas, kekuatan fisik, maupun dukungan kelompok sebaya. Relasi yang timpang ini menciptakan pola dominasi dan



subordinasi yang direproduksi secara sosial dalam kehidupan sekolah. Dalam konteks tersebut, perundungan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang menegaskan hierarki dan eksklusi terhadap siswa yang dianggap berbeda atau lemah (Mazumdar, 2022; Maharani, 2024).

Perkembangan teknologi digital turut mengubah wajah perundungan di lingkungan pendidikan. *Cyberbullying* menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta memungkinkan pelaku untuk melakukan kekerasan secara anonim. Penelitian menunjukkan bahwa perundungan digital sering kali berlanjut dari konflik yang terjadi di sekolah, kemudian diperparah melalui media sosial dan platform pesan instan. Dampak cyberbullying cenderung lebih berat karena korban mengalami tekanan psikologis yang terus-menerus dan sulit menghindari paparan kekerasan tersebut (Ningsih et al., 2025; Valera-Pozo et al., 2021). Selain faktor individu dan teknologi, dinamika perundungan juga dipengaruhi oleh budaya dan iklim sekolah. Sekolah yang kurang memiliki aturan tegas, mekanisme pengaduan yang aman, serta keteladanan etis dari pendidik cenderung menjadi ruang subur bagi praktik perundungan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa sikap abai atau permisif dari guru terhadap perilaku agresif siswa berkontribusi pada reproduksi kekerasan sosial di lingkungan sekolah. Ketika perundungan tidak ditangani secara konsisten, sekolah secara tidak langsung membangun budaya diam yang merugikan korban (Permanasari, 2024; Pukada et al., 2025). Secara keseluruhan, dinamika perundungan di sekolah mencerminkan interaksi kompleks antara faktor individu, struktur sosial, budaya sekolah, dan perkembangan teknologi. Perundungan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dalam sistem relasi sosial yang gagal menanamkan nilai saling menghormati dan keadilan. Oleh karena itu, memahami bentuk dan dinamika perundungan menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformatif melalui pendidikan karakter dan penguatan etika sosial di lingkungan sekolah.

Perundungan sebagai Indikator Kegagalan Internalisasi Etika Sosial

Perundungan di lingkungan sekolah dapat dipahami sebagai refleksi dari kegagalan proses internalisasi etika sosial dalam pendidikan. Etika sosial menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan dalam relasi sosial, serta tanggung jawab moral terhadap sesama. Ketika praktik perundungan berlangsung secara berulang dan diterima sebagai bagian dari kehidupan sekolah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai etis belum tertanam secara mendalam dalam kesadaran peserta didik. Sejumlah kajian menegaskan bahwa perilaku agresif dan diskriminatif di sekolah lebih banyak dipengaruhi oleh lemahnya pembelajaran nilai dan absennya internalisasi moral dalam praktik pendidikan sehari-hari dibandingkan oleh faktor individual semata (Maharani, 2024; Azhari et al., 2023). Kegagalan internalisasi etika sosial juga tercermin dari normalisasi perundungan dalam budaya sekolah. Ejekan, pengucilan, dan kekerasan simbolik sering kali tidak dipandang sebagai pelanggaran moral yang serius, melainkan dianggap sebagai dinamika interaksi antarsiswa yang wajar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif yang diajarkan secara formal dengan realitas sosial yang dialami siswa. Literatur pendidikan karakter menegaskan bahwa pendidikan etika yang hanya bersifat kognitif dan normatif tanpa keteladanan serta penguatan budaya sekolah tidak efektif dalam membentuk kesadaran moral peserta didik (Ismail & Hasanah, 2023; Azhari et al., 2023).

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, perundungan mencerminkan lemahnya pemahaman siswa terhadap prinsip hidup bersama dalam masyarakat yang berkeadilan. Nilai-nilai seperti kesetaraan, solidaritas, dan penghormatan terhadap hak orang lain seharusnya menjadi dasar relasi sosial di sekolah sebagai miniatur kehidupan bermasyarakat. Namun, praktik perundungan justru menunjukkan dominasi kelompok tertentu dan pengabaian terhadap hak pihak yang lebih lemah. Beberapa penelitian menegaskan bahwa kegagalan ini berkaitan dengan belum optimalnya integrasi pendidikan etika sosial dan kewargaan dalam pembelajaran yang kontekstual dan reflektif (Susi & Rahayu, 2025; Mazumdar, 2022). Perundungan juga menandakan belum optimalnya peran institusi pendidikan sebagai agen pembentukan moral dan sosial. Sekolah tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dan kesadaran etis peserta didik. Ketika sekolah gagal menciptakan iklim yang aman, adil, dan menghargai martabat setiap individu, maka proses internalisasi etika sosial menjadi terhambat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lemahnya komitmen institusional, inkonsistensi penegakan aturan, serta kurangnya keteladanan pendidik berkontribusi terhadap reproduksi perilaku tidak etis di lingkungan sekolah (Pukada et al.,



2025; Permanasari, 2024). Dengan demikian, perundungan dapat diposisikan sebagai indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan pendidikan etika sosial di sekolah. Tingginya kasus perundungan menunjukkan bahwa nilai-nilai moral belum terinternalisasi secara efektif dalam struktur, budaya, dan praktik pendidikan. Oleh karena itu, pencegahan perundungan perlu diarahkan pada penguatan internalisasi etika sosial melalui pendekatan holistik, mencakup pembelajaran berbasis nilai, keteladanan pendidik, serta pembangunan budaya sekolah yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan perundungan bukan sekadar persoalan disiplin, melainkan bagian dari misi fundamental pendidikan dalam membentuk manusia yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial.

Implikasi Perundungan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

Perundungan di lingkungan sekolah memiliki implikasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia karena sekolah merupakan fase awal pembentukan karakter, sikap sosial, dan etos kewargaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengalaman perundungan pada masa pendidikan dasar dan menengah tidak berhenti sebagai peristiwa individual, melainkan membentuk pola sikap, kepercayaan diri, dan kemampuan sosial peserta didik di masa dewasa. Ketika lingkungan sekolah gagal memberikan rasa aman dan keadilan, siswa berpotensi tumbuh dengan karakter yang rapuh, kurang empati, serta rendah kepercayaan terhadap institusi sosial. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kualitas manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan (Yulianti et al., 2024; Maharani, 2024). Dari perspektif pengembangan kompetensi sosial dan emosional, perundungan berdampak negatif terhadap kemampuan individu untuk bekerja sama, berkomunikasi secara sehat, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Literatur menunjukkan bahwa korban perundungan cenderung mengalami kesulitan dalam membangun relasi interpersonal yang setara, sementara pelaku perundungan berisiko mengembangkan pola relasi yang dominatif dan agresif. Kedua kondisi tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat yang menuntut kolaborasi, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, perundungan berkontribusi pada rendahnya kualitas modal sosial yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia (Mazumdar, 2022; Azhari et al., 2023).

Implikasi perundungan terhadap kualitas sumber daya manusia juga terlihat dari aspek kesehatan mental dan produktivitas. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa dampak psikologis bullying, seperti kecemasan, depresi, dan trauma, dapat berlanjut hingga usia dewasa dan memengaruhi kapasitas individu dalam belajar, bekerja, serta berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial. Individu yang tumbuh dalam pengalaman pendidikan yang penuh tekanan dan kekerasan cenderung memiliki daya tahan psikologis yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan bukan hanya persoalan kesejahteraan siswa saat ini, tetapi juga ancaman terhadap kualitas tenaga kerja dan warga negara di masa depan (Valera-Pozo et al., 2021; Ningsih et al., 2025). Dalam konteks pendidikan nasional, tingginya praktik perundungan mencerminkan lemahnya kontribusi sistem pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan beretika. Pendidikan yang gagal menanamkan nilai empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial berpotensi melahirkan individu yang kurang memiliki kepekaan sosial dan komitmen terhadap nilai kemanusiaan. Sejumlah kajian menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter yang tidak konsisten dan bersifat simbolik tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lulusan. Oleh karena itu, perundungan dapat dipahami sebagai indikator kegagalan sistemik dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing sekaligus bermoral (Pukada et al., 2025; Ismail & Hasanah, 2023). Dengan demikian, upaya pencegahan perundungan memiliki makna strategis dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Penguatan pendidikan karakter dan etika sosial di sekolah perlu diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk individu yang sehat secara mental, matang secara moral, dan mampu hidup dalam relasi sosial yang adil. Ketika sekolah berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan beretika, proses pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Perspektif ini menegaskan bahwa pemberantasan perundungan merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara holistik dan berkelanjutan.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka sistematis, dapat disimpulkan bahwa perundungan di sekolah merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks dan sistemik, dengan bentuk yang beragam mulai dari kekerasan verbal, relasional, hingga digital. Dinamika perundungan tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa antarsiswa, budaya sekolah, serta lemahnya internalisasi etika sosial dalam praktik pendidikan. Normalisasi perilaku agresif dan rendahnya penghormatan terhadap martabat manusia menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif yang diajarkan dan realitas sosial di lingkungan sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa perundungan bukan sekadar persoalan kedisiplinan atau perilaku individual, melainkan indikator kegagalan pendidikan dalam membentuk karakter, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan simpulan tersebut, pencegahan perundungan perlu diarahkan pada penguatan pendidikan karakter dan etika sosial secara terintegrasi dalam kurikulum, budaya sekolah, dan tata kelola pendidikan. Sekolah perlu membangun iklim yang aman dan inklusif melalui keteladanan pendidik, penegakan aturan yang adil, serta mekanisme pencegahan dan penanganan perundungan yang berorientasi pada perlindungan peserta didik. Secara teoretis, kajian tentang perundungan perlu dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner yang mengaitkan pendidikan, etika sosial, dan hak asasi manusia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali secara empiris efektivitas pendidikan karakter dan kebijakan anti-perundungan di berbagai konteks pendidikan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih operasional dan berbasis bukti dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Azhari, A. Y., Janah, D. L. N., Meyliana, F. E., & Setiawan, B. (2023). Pengaruh Perkembangan Pendidikan Karakter Dalam Mengatasi Masalah Bullying Di Indonesia. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 2(4), 257–271. <https://doi.org/10.58192/sidu.v2i4.1588>
- BPS. (2025a, November 5). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,02*. <https://www.bps.go.id/> <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2480/indeks-pembangunan-manusia-ipm-indonesia-tahun-2025-mencapai-75-90--meningkat-0-88-poin-dibandingkan-tahun-sebelumnya-yang-sebesar-75-02-.html>
- BPS. (2025b, November 5). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. <https://www.bps.go.id/> <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2479/unemployment-rate-was-4-85-percent--the-average-wage-of-employees-was-3-33-million-rupiah-.html>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- detikcom, T. (2025, Nopember). *Sampai Prabowo Angkat Bicara Agar Bullying di Sekolah Diatasi Segera*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-8215811/sampai-prabowo-angkat-bicara-agar-bullying-di-sekolah-diatisasi-segera>
- Gutzwiller-Helfenfinger, E., & Perren, S. (2022). The Moral Dimensions of Bullying at School. In M. Killen & J. G. Smetana, *Handbook of Moral Development* (3rd ed., pp. 437–453). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003047247-34>
- Ismail, S., & Hasanah, A. (2023). Efektivitas Program Pendidikan Karakter di Sekolah: Sebuah Studi Deskriptif Analitis. *Ulul Albab: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 175–187. <https://doi.org/10.30999/ululbab.v1i3.3352>



- Kemenpppa. (2025, Nopember). *Kecam Kasus Perundungan di SMPN 19 Tangerang Selatan, Menteri PPPA Tegaskan Sekolah Harus Jadi Tempat Aman untuk Belajar*. [Https://Kemenpppa.Go.Id/](https://Kemenpppa.Go.Id/). <https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kecam-kasus-perundungan-di-smpn-19-tangerang-selatan-menteri-pppa-tegaskan-sekolah-harus-jadi-tempat-aman-untuk-belajar>
- KPAI. (2025, November 19). Kasus Kekerasan di Sekolah Meningkat, KPAI Desak Reformasi Menyeluruh Sistem Pendidikan Aman Anak. *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-di-sekolah-meningkat-kpai-desak-reformasi-menyeluruh-sistem-pendidikan-aman-anak>
- Maharani, A. P. (2024). Bullying di dalam dunia pendidikan: Perspektif sosiologi pendidikan dan risiko kematian siswa. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(2), 162–175. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3432>
- Manggali, G. S., & Rohman, A. (2024). Promblematika Pencegahan dan Penangan Tindakan Perundungan di Lingkungan Sekolah Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 216–222. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9809>
- Mazumdar, S. (2022). Education and society: Role of schools in influencing the mechanisms of societal structure. *Towards Excellence*, 1107–1112. <https://doi.org/10.37867/TE140398>
- McGuire, K. (2022). Historical Trauma, Post Traumatic Stress Disorder And Hate Crime Victims: A Review. *Open Access Journal of Addiction and Psychology*, 5(4). <https://doi.org/10.33552/OAJAP.2022.05.000620>
- Meza, M. I., Vilcahuaman, J. M., Camarena, J. F. M., Iparraguirre, D. F. D. C., Privat, M. H. C., & Sayas, N. S. Q. (2023). *Visibilizando la violencia escolar y la agresividad de los adolescentes en instituciones educativas*. Editora CLAEC. <https://doi.org/10.23899/9786586746310>
- Michelini, M.-C. (2022). Rethinking Ethical and Social Education. *Revista Letra Magna*, 18(31), 2–12. <https://doi.org/10.47734/lm.v18i31.2153>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Ningsih, S. R., Isnaini, M. S., Ruslaini, H., Nasution, N., Syahfitri, K., & Rahmayani, R. (2025). Pengalaman Remaja dalam Proses Kebangkitan dan Pemulihan Diri Setelah Mengalami Trauma Akibat Cyberbullying pada Era Digital. *Jurnal Pendidikan Dirgantara*, 2(3), 322–331. <https://doi.org/10.61132/jupendir.v2i3.615>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Permanasari, A. (2024). Urgent need to form a task force to end bullying in schools. *International Journal of Advance Research in Education & Literature (ISSN 2208-2441)*, 10(9), 1–6. <https://doi.org/10.61841/ew70yh35>
- Pratama, R. A., & Husniyah, H. (2025). Efektivitas program anti bullying terhadap karakter siswa di Sekolah Menengah Atas. *Studia Religia : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 9(01), 64–72. <https://doi.org/10.30651/sr.v9i01.25628>
- Pukada, M. A. H., Tiwery, E., Hida, E. U., & Enus, O. E. (2025). Analisis implementasi kebijakan pendidikan program penguatan pendidikan karakter di Sekolah Menengah Atas: Program penguatan pendidikan karakter. *TRISALA: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN*, 10(3). <https://doi.org/10.54211/trisala.v10i3.160>



- Pusiknas. (2025, December 5). *Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat*. <Https://Pusiknas.Polri.Go.Id/>. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suanto, S., & Nurdiyana, N. (2020). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 107. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p107-114>
- Susi, & Rahayu, Y. M. (2025). Optimizing Bullying Prevention Policies and Programs through Civic Education in Junior High Schools in South Tangerang City. *Academy of Education Journal*, 16(2), 231–142. <https://doi.org/10.47200/aoej.v16i2.2816>
- Valera-Pozo, M., Flexas, A., Servera, M., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2021). Long-Term Profiles of Bullying Victims and Aggressors: A Retrospective Study. *Frontiers in Psychology*, 12, 631276. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.631276>
- Wastri, L., Saadah, N., & Zulmuqim, Z. (2023). Evaluasi Pendidikan dalam Konteks Aspek Politik, Etika dan Interpersonal. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 15(2), 269–277. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i2.2372>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yilmaz, T. (2021). Victimology from clinical psychology perspective: Psychological assessment of victims and professionals working with victims. *Current Psychology*, 40(4), 1592–1600. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01433-z>
- Yulianti, Y., Pakpahan, I., Angraini, D., Ayunabilla, R., Aura Febia, A., & Iham Habibi, M. (2024). Dampak bullying terhadap kesehatan mental. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 10(1), 153. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v10i1.13212>
- Zahrani, Y. (2024). Systematic Literature Review: The Effects of Bullying on Students. *King Khalid University Journal of Health Sciences*, 9(2), 80–97. https://doi.org/10.4103/KKUJHS.KKUJHS_12_24